

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.1 Latar Belakang dan Masalah**

Perkembangan tata kelola pembangunan daerah dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia telah ditandai dengan perubahan mendasar pada dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek ekonomi. Pada aspek politik tercermin pada semakin kuatnya kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan di daerah, sedangkan dimensi ekonomi ditandai dengan adanya kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang semakin besar. Dua hal tersebut merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, serta keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka terima dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Desentralisasi juga merupakan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan pemerintah daerah (*local government financial management*) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (Sriyana, 2011).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2007). Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk

belanja rutin. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

Sumber pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Potensi keuangan daerah yang tidak sama antar daerah menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,42% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemerintah daerah sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama

pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang meneliti mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada  $\alpha = 1\%$ . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menambah variabel independen lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jumlah Penduduk (JP).

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pemerintah kabupaten kota di Jawa tengah dan DIY. Hal yang menjadi pertimbangan penulis memilih Provinsi DIY dan Jawa Tengah sebagai obyek penelitian adalah adanya peningkatan belanja modal di Provinsi DIY dan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (DJPK, 2015). Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah DIY memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota di DIY dan Jawa Tengah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah DAU berpengaruh terhadap belanja modal ?
- b. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal ?
- c. Apakah DAK berpengaruh terhadap belanja modal ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh DAU, Jumlah Penduduk dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis khususnya di bidang pengalokasian belanja modal di tiap-tiap Provinsi di Indonesia. dan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah provinsi terkait pemanfaatan DAU dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel-variabel penelitian, dan analisis data.

### **Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan data khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah analisis sehingga akan membawa ke tujuan dan sasaran penelitian.

### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.